

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, sebab melalui pendidikan manusia mampu mengetahui lingkungannya. Tak hanya itu, dengan pendidikan pula manusia mampu membangun peradabannya. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa tujuan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab akan mengembangkan pendidikan serta mencerdaskan seluruh rakyatnya. Oleh sebab itu pendidikan adalah suatu hal yang penting serta tidak terlepas dari seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu aspek politik. Politik diartikan sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Pendidikan tidak terlepas dari politik, meski pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya, meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan.¹ Karena memang tidak mungkin memisahkan pendidikan dengan meninggalkan kekuasaan ataupun sebaliknya.

Pada perjalanan sejarah Indonesia, pendidikan selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan politik rezim yang berkuasa. Sebagai contoh adalah

¹ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 2

salah satunya politik yang dilakukan Orde Baru pendidikan digunakan sebagai alat penyeragaman dengan tujuan agar stabilitas politik tercapai, sehingga perkembangan ekonomi bisa terus ditingkatkan. Atas nama modernisasi dan pembangunan ekonomi, pendidikan pada zaman Orde Baru akhirnya mampu menyerabut sebagian kebudayaan masyarakat menjadi kebudayaan Barat yang dianggap lebih maju.

Berlangsungnya rezim Soeharto selama 32 tahun telah banyak memberlakukan kebijakan-kebijakan kontroversial dalam bidang pendidikan, baik menyangkut pengelolaan kurikulum maupun kegiatan pembelajaran misalnya, kebijakan tentang kurikulum Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan kebijakan tentang seragam sekolah, khususnya tentang hak mengenakan jilbab bagi siswi di sekolah umum.² Meski secara konsep maupun istilah berbeda, kata politik dan pendidikan sering digunakan bersama serta menjadi dua istilah yang berbeda yaitu pendidikan politik dan politik pendidikan.

Dengan demikian, istilah pendidikan politik dan politik pendidikan itu berbeda. namun, istilah tersebut saling berkaitan karena kebijakan yang dibuat di ranah pendidikan selalu merefleksikan masyarakat dan pandangan politik si pembuat kebijakan. Pada hal ini pembuat kebijakan bisa berupa organisasi kecil maupun organisasi besar seperti Negara, sehingga keputusan-keputusan dalam bidang pendidikan selalu didasarkan kepada pertimbangan politik. Istilah pendidikan politik diartikan sebagai upaya pemerintah menerapkan suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun

² M.Sirozi, Ph.D, *Politik Pendidikan* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), h. 40

informal untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Sehingga, pendidikan politik lebih berorientasi pada bagaimana peserta didik menjadi manusia yang melek politik lewat ranah-ranah pendidikan.

Sementara istilah politik pendidikan diartikan sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik ditingkat lokal maupun nasional. Artinya pendidikan dianggap sebagai hal yang politis dan kebijakan yang menyangkut pendidikan tersebut harus dilalui lewat jalur yang politis.

Politik tentu tidak terlepas dari kekuasaan. Kekuasaan ada karena adanya konsensus dari mereka yang meyakini seorang atau organisasi untuk mengambil keputusan strategis maupun politis dalam bidang apapun termasuk pendidikan. Politik pendidikan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sejak dilaksanakannya politik etis pada 1901, Hindia Belanda semacam mendapat angin segar dari negeri Belanda. Tanah jajahan yang sudah sekian lama dieksploitasi baik alam maupun manusianya akhirnya bisa mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari rasa keprihatinan mereka dengan keadaan rakyat pribumi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun sekolah dan mendidik pribumi sebagai wujud dari keprihatinan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah kolonial tetap melakukan diskriminasi dengan memisahkan sekolah khusus untuk anak Belanda dan Eropa, serta priyayi dan rakyat biasa.

Pembagian itu dilakukan untuk tetap membuat golongan-golongan dalam masyarakat terpisah. Menurut perspektif konflik, pendidikan telah melakukan reproduksi sosial.³ Pada hal ini tentu rakyat biasa yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan modal sosial lainnya tidak akan mampu bersekolah. Perbedaan materi pelajaran pun terjadi antara sekolah Eropa dan sekolah pribumi. Salah satu contoh perbedaan dalam penggunaan bahasa pengantar dan buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran yang berdampak kepada perbedaan ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah. Dari segi pengetahuan anak priyayi akan mendapat lebih ketimbang anak rakyat biasa dan hal ini berdampak pada posisi di masyarakat serta jabatan di instansi pemerintahan.

Sekolah yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda tentu memiliki kurikulum tersendiri untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang akan mereka terjemahkan lewat pendidikan. Di samping kurikulum yang tertulis mereka juga memiliki kurikulum tersembunyi yang menguntungkan pihak tertentu. Pada hal ini tentu pemerintah kolonial Belanda sebagai pemangku kebijakan sekaligus pemilik modal. Sekolah mengajarkan kepada siswa bagaimana cara berperilaku, berbahasa, keterampilan yang baik sesuai dengan tuntutan pasar kerja.⁴ Dari persoalan diatas serta banyaknya rakyat yang tidak dapat bersekolah membuat Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangan lainnya, Ki Hajar mendirikan *National Onderwijs Instituut Tamansiswa* atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Taman Siswa

³ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di sekolah; Sebuah ide sosiologi pendidikan Pierre Bourdieu* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 26

⁴ *Ibid.*, h. 27

pada 3 Juli 1922.⁵ Sistem pendidikan Taman Siswa muncul akibat kegagalan pemerintah memenuhi atau menyalurkan sistem pendidikan Barat. Selama perjalanannya, Taman Siswa selalu bersikap non-kooperatif kepada pemerintah sehingga banyak tokoh pergerakan nasional menggunakan Taman Siswa sebagai alat untuk menyebarkan gagasan kemerdekaan hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Perubahan mendasar pun terjadi, Indonesia yang sebelumnya terjajah menjadi suatu negara yang merdeka hal itu turut pula menciptakan perubahan-perubahan dalam internal Taman Siswa. Perjalanan itu diawali dengan adanya pertentangan mengenai masih diperlukannya Taman Siswa di zaman kemerdekaan. Pertentangan, jawaban, eksistensi, dan arah pendidikan Taman Siswa kedepan akan dijawab serta diputuskan melalui Rapat Besar Umum yang dilakukan Taman Siswa hingga puncaknya diadakan Rapat Besar Umum taman siswa ke VI pada 1-5 maret 1950. Salah satu keputusannya ialah menerima *preadvis* Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan, dan isinya yaitu mendukung gagasan pendidikan nasional. Tentu dengan adanya keputusan ini, politik pendidikan Taman Siswa pun berubah disebabkan banyaknya perubahan keputusan serta banyaknya pertimbangan Taman Siswa dalam ranah eksistensi serta konsistensi organisasi. Pada masa kemerdekaan Taman Siswa tidak mau memperlihatkan dengan nama nasional seperti dalam

⁵ Imam Ghozali, *Ki Hajar Dewantara, Pendidik Nasionalis yang Agamis* (Yogyakarta:Zanafa Publishing.2013),h. 2

jaman penjajahan, karena sifat pendidikan dan pengajaran pada masa ini seharusnya sudah nasional.⁶

Politik pendidikan yang dilakukan oleh Taman Siswa menjadi hal yang sangat menarik dilihat dari bagaimana perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan Taman Siswa. Salah satunya adalah mengenai subsidi atau sumbangan untuk taman siswa. jika ketika zaman kolonial Taman Siswa benar-benar memegang teguh istilah yang digunakan Ki Hajar yaitu *Zelfbedruipingssijsteem*⁷ karena mempunyai keyakinan bahwa bantuan itu akan mengikatnya dan sedikitnya melemahkan jiwa perjuangan, maka pasca kemerdekaan Indonesia, Taman Siswa mengubah kebijakan mengenai subsidi namun tetap terlihat idealis dalam pengungkapan maupun pelaksanaannya.

Ki Hajar membolehkan adanya dana subsidi namun dengan catatan itu tidak mengurangi keleluasaan kemerdekaan. Selain itu juga ada keyakinan bahwa bantuan atau subsidi yang diberikan pemerintah untuk Taman Siswa tidak akan mengikat seperti yang dibayangkan pada jaman penjajahan. Seperti yang terjadi pada Mei 1950, kala itu Taman Siswa mengirimkan surat kepada kementerian Pendidikan untuk mendapatkan Subsidi dan akhirnya pada Bulan Juli 1950, Majelis Luhur menerima jawaban dari Kementerian Pendidikan dan mendapat subsidi dari pemerintah sebagaimana yang ditulis dalam Majalah Taman Siswa yakni Majalah Pusara.

⁶ S.A Soedibjo, *Sedikit tentang organisasi Taman Siswa*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun* (Yogyakarta: UST Press, 1952) ,h. 182

⁷Zelfbedruipingssijsteem atau sistem membiayai diri sendiri adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Ki Hajar guna bertahan dari blockade belanda lewat ordonasi pengawasan. Sistem ini ditujukan membiayai segala macam keperluan akomodasi dan guna menjalankan roda organisasi serta sekolah.

“Atas usaha Madjelis Luhur untuk mendapatkan subsidi atau tunjangan guna tjabang2nja jang belum menerimanja buat tahun pengadjaran 1949/1950 jbl., dengan suratnja kepada Kementrian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia di Jogjakarta tertanggal 27 Mei 1950 No.Pb-36/D.J/50. Maka pada 21 Djuli 1950 M.L telah menerima djawaban dengan surat putusannja tanggal 13 Djuli 1950 No.5305/B jang isi maksudnja: semua tjabang dengan keterangan daftar jang dimintakan oleh M.L., itu semua diberi, tetapi hanja sekedar tundjangan dengan perhitungan djumlah murid”.⁸

Oleh karena itu sangat menarik untuk mengkaji Politik pendidikan Taman siswa pada kurun tahun 1945-1950 karena pada masa itu dinamika politik pendidikan Taman Siswa sangat dinamis. Pada internal Taman Siswa pun terdapat berbagai pendapat tentang jalannya organisasi. Sehingga dapat dilihat bagaimana sepak terjang politik pendidikan Taman Siswa, yang akan berpengaruh kepada kebijakan Pendidikan Nasional. Pada saat Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946—26 Juni 1947) Jabatan Menteri Pendidikan dijabat oleh Mr.Suwandi. Pada masa Suwandi ini di Yogyakarta dibentuk suatu panitia yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran, yakni Panitia Penyelidik Pengajar Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara.⁹ Sehingga menghasilkan dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial yang itu kurang lebih sudah menjadi prinsip dari azas Taman Siswa 1922 dan Dasar Taman Siswa 1947.

Periode 1945—1950 merupakan sebuah titik balik Taman Siswa, perjuangan yang dilakukan oleh Taman Siswa pun turut berubah mengikuti kondisi zaman yang telah berubah pula. Sebuah negara jajahan menjadi negara merdeka. Dari tidak mempunyai apa-apa hingga mempunyai negara dan perangkatnya. Suatu revolusi yang mendadak

⁸ Pusara, Agustus 1950 Djilid XII No.2, h.33

⁹ Poesponegoro. 2009 *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka : Jakarta h.283

spontan, tidak direncanakan lebih dahulu cara-caranya.¹⁰ Maka sikap serta garis politik Taman Siswa yang sebelumnya anti pemerintahan pun turut berubah seiring dengan berjalannya Indonesia sebagai sebuah pemerintahan yang merdeka.

Begitu pula mengenai sikap serta politik Taman Siswa yang kala itu di zaman mempertahankan kemerdekaan dan berjuang mengusir sisa-sisa penjajah namun tetap membicarakan masalah pendidikan. Maka dari itu banyak dari siswa maupun guru Taman Siswa yang ikut mengangkat senjata, namun tetap melakukan kegiatan belajar mengajar.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Lingkup Temporal

Taman Siswa adalah suatu organisasi yang berdiri sejak 3 Juli 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pembahasan yang diambil oleh skripsi ini adalah batasan waktu antara 1945—1950. Pembatasan ini didasarkan pada fakta bahwa kemerdekaan yang terjadi di Indonesia turut mengubah arah politik pendidikan yang dilaksanakan oleh Taman Siswa serta dinamika yang terjadi di internal Taman Siswa dalam hal menyikapi kemerdekaan Indonesia. Adapun pembatasan hingga 1950, sebab itu akhirnya Rapat Besar Umum Taman Siswa ke VI pada 1—5 Maret 1950 mengeluarkan putusan yang salah satunya berisi tentang diterimanya keputusan Rapat besar Umum 1947 yang berisi tentang untuk tetap menjalankan Taman Siswa dan mengikuti pemerintahan nasional dan menerima *preadvise* Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan

¹⁰ Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun* (Yogyakarta: UST Press, Yogyakarta, 1952), h.269

kebudayaan, salah satu isinya adalah mendukung kearah pendidikan nasional dan mendapat subsidi serta bantuan keuangan dari pemerintah.

Sebelumnya telah ada jurnal yang menulis tentang sistem pendidikan Taman Siswa seperti yang ditulis Dheny Wiratmoko "*Sistem pendidikan Taman Siswa : studi kasus pemikiran Ki Hajar Dewantara*". namun yang dibicarakan Dheny lebih ke sistem pendidikan Taman siswa secara keseluruhan. Sehingga ditegaskan bahwa penelitian ini tidak secara spesifik membahas tentang bagaimana sistem pendidikan Taman Siswa dan perubahannya lebih dari itu juga membahas tentang bagaimana keputusan yang diambil Taman Siswa dalam periode 1945—1950.

2. Lingkup Spasial

Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Taman Siswa sebagai organisasi besar yang berpusat di Yogyakarta maka Lingkup Spasial ini adalah Taman Siswa Yogyakarta. Sebab, sebagai pusat organisasi tentu keputusan yang diambil Taman Siswa turut mengubah pula politik pendidikan dan dinamika yang terjadi di sekolah dan cabang-cabang Taman Siswa yang ada di seluruh Indonesia, yang sebagian besar keputusan dan politik pendidikan yang dilakukan oleh Taman Siswa ditulis di Majalah Taman Siswa, koran sezaman, maupun arsip-arsip yang berbicara mengenai peran Taman Siswa.

3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini dapat digolongkan kedalam disiplin ilmu sejarah, karena disiplin ilmu sejarah ini mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau. Objek kajian sejarah antara lain

sejarah sosial, sejarah politik, sejarah mentalitas, sejarah intelektual, sejarah ekonomi, sejarah agraria, sejarah kebudayaan, sejarah maritim, sejarah geografi, sejarah militer, sejarah perempuan, sejarah diplomatik, sejarah pendidikan, sejarah ilmu pengetahuan.¹¹ Mengingat masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan eksistensi, dinamika, dan kebijakan Taman Siswa sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, maka lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan data terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pembentukan Taman Siswa sebagai organisasi pendidikan?
2. Bagaimana politik pendidikan Taman Siswa dalam periode 1945 – 1950?
3. Apa dampak dari politik pendidikan Taman Siswa bagi pendidikan Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana “*Politik Pendidikan Taman Siswa (1945 – 1950)*”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk :

¹¹ <http://www.astalog.com/4621/apa-objek-penelitian-dan-kajian-ilmu-sejarah.html> diakses pada 6 November 2015 pukul 10.35

1. Sebagai pengetahuan baru tentang dinamika politik Taman Siswa sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah, institusi yang bergelut di bidang pendidikan, dan bagi Taman Siswa sendiri.

F. Metode dan Sumber Penelitian

Didalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang memiliki lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) Pengumpulan sumber, (3) verifikasi (Kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.¹²

Pada pemilihan topik penelitian didasari oleh dua hal, antara lain kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Namun dalam hal ini kedekatan emosional yang dimiliki penulis adalah sebagai calon guru yang sedikit banyak harus mengerti tentang bagaimana pendidikan dan politik pendidikan yang dikerjakan para pendahulu hingga menjadi pendidikan yang sampai hari ini masih digunakan. Kedekatan emosional antara penulis dengan tema atau objek penelitian harus diimbangi dengan kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai referensi yang terkait dengan tema atau objek penelitian yang dipilih¹³. Topik ini juga diambil berdasarkan kedekatan intelektual, penulis sejak dimasa kuliahnya telah tertarik dengan berbagai sumber mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia.

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan ialah mengumpulkan sumber-sumber yang berguna sebagai pendukung penelitian. Pengumpulan sumber-sumber peneliti lakukan sejak peneliti masih berkuliah, dan

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), h. 69

¹³ Muhammad Arif. *Pengantar Kajian Sejarah* (Bandung : Yrama Widya. 2011), Hal 42

berkunjung ke perpustakaan nasional hingga ke Taman Siswa, Yogyakarta. Sumber yang penulis dapatkan berupa buku-buku, Koran-koran, artikel-artikel terbitan sezaman seperti majalah terbitan Taman Siswa “Pusara”. Selain itu penulis juga menemui beberapa narasumber yang masih dapat dimintai keterangan seputar peristiwa yang penulis teliti, dan berbagai literasi yang bisa digunakan sebagai pendukung penulis dalam menulis.

Di dalam interpretasi penulis melakukan analisis atas sumber-sumber yang penulis temukan untuk mengetahui keabsahan atas sumber yang penulis temukan. Analisis tersebut dimaksudkan dengan mencocokkan data yang didapat dengan berbagai sumber baik primer maupun sekunder agar menemukan sebuah pernyataan yang valid. Setelah itu meneruskannya kepada penulisan, penulis melakukan sintesis terhadap data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Tahap terakhir ialah penulisan, yang mana peneliti menggunakan sistematika penulisan sejarah yang mengedepankan aspek kronologi.